



PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Nurhidayah[✉]

Prodi Pendidikan IPS, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Januari 2012
Disetujui Februari 2012
Dipublikasikan Juni 2012

Keywords:
Women
Political participation
Decision making
Gender

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendapatkan gambaran bentuk-bentuk partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam mengambil keputusan politik pada DPRD Kota Semarang, dan (2) mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam mengambil keputusan politik pada DPRD Kota Semarang. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan fokus penelitian adalah aktifitas anggota legislatif perempuan dalam mengambil keputusan-keputusan politik pada DPRD Kota Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Objektivitas data diuji dengan teknik triangulasi metode. Sedangkan analisis data dilakukan dengan interactive analysis model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan belum optimal karena bentuk partisipasi yang dilakukan masih sangat bergantung pada apa yang diusulkan pemerintah. Inisiatif anggota legislatif perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan belum banyak dilakukan karena masih sebatas semangat, tetapi belum mampu menghilangkan kendala-kendala yang menghambatnya.

Abstract

This study aims to: (1) map the forms of political participation of women legislative members in decision making at the Regional House of Representatives in Semarang, and (2) map the factors which influence political participation of women legislative members in decision making at the Regional House of Representatives in Semarang. This study employs qualitative approach by focusing on the activities of women legislative members in decision making at the Regional House of Representatives in Semarang. Data was collected by interview, observation, and document study. Triangulation was used to crosscheck the data. Data was analysed by interactive analysis model. Results show that women political participation has not been maximum, because their participation is under the government control. Only a few initiative is made by the women legislative members to fight for women's rights. It is still in the form of discourse, yet the real problems are there.

Pendahuluan

Penduduk Kota Semarang berjumlah 1.434.025 orang yang terdiri dari 711.761 orang laki-laki dan 722.264 orang perempuan. Meskipun jumlah penduduk perempuan lebih banyak, namun perempuan yang terpilih sebagai anggota legislatif dalam Pemilu tahun 2009 hanya berjumlah 6 (enam) orang. Kenyataan itu tidak dapat dipisahkan dari *image* dan konstruksi sosial yang berkembang dan dipahami masyarakat Semarang. *Image* yang berkembang dalam masyarakat bahwa 'perempuan tidak layak terjun dalam dunia politik'. Perempuan tidak layak memimpin karena perempuan tidak rasional dan lebih mengandalkan emosinya. *Image* dan konstruksi sosial tersebut menyebabkan terjadinya ketimpangan gender sebagaimana terlihat dari hasil pemilu tahun 2009 tidak mampu meraih kuota 30% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila jumlah anggota legislatif perempuan mencapai 30% dari seluruh anggota legislatif dan berlatar belakang pendidikan tinggi, maka upaya untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dapat tercapai secara optimal. Sekurang-kurangnya, dengan jumlah anggota legislatif perempuan yang besar akan memperkuat kedudukannya dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Artinya, suara mereka dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kaum perempuan di dalam sidang-sidang legislatif semakin diperhitungkan. Dengan demikian, harapan terwujudnya kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan melalui penciptaan lapangan kerja yang berperspektif perempuan, peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak perempuan, kesempatan mengakses pendidikan bagi perempuan semakin terbuka.

Pada dasarnya, setiap gerakan atau perjuangan perempuan mempunyai tujuan pokok yang sama, yaitu untuk meningkatkan kedudukan wanita dan menghilangkan perlakuan diskriminatif antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Salah satu nilai gerakan perempuan Indonesia adalah nasionalisme. Perkembangan gerakan perempuan Indonesia sebagai gerakan sosial tidak dapat dipisahkan dari keadaan masyarakatnya. Dalam prakteknya, gerakan perempuan yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi terus mengalami perkembangan. Gerakan perempuan, baik pada masa perjuangan maupun pada masa kemerdekaan dapat digolongkan sebagai gerakan sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum disebutkan

bahwa setiap partai politik harus menyediakan kuota sebesar 30% bagi perempuan yang diajukan sebagai calon anggota legislatif, baik di DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, maupun DPR RI. Ketentuan tersebut merupakan peluang bagi kaum perempuan untuk berperan serta dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Perjuangan itu semakin efektif apabila dilakukan melalui jalur politik, di mana kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan harus didasarkan kepada keputusan-keputusan politik. Namun, peluang tersebut belum mendapat respon positif, baik dari partai politik maupun kaum perempuan yang bersangkutan.

Partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam mengambil keputusan-keputusan merupakan sebuah keniscayaan karena tidak setiap peluang dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal itu dapat dimaklumi karena partisipasi politik kaum perempuan masih relatif terbatas sebagai akibat keterbatasan kemampuannya. Meskipun demikian, hak-hak politik kaum perempuan terus berkembang dan semakin banyak mendapat pengakuan secara representatif. Peluang itulah yang harus dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Setiap perempuan harus berusaha meningkatkan kemampuannya agar dapat berperan serta dalam pemberdayaan kaum perempuan melalui jalur politik.

Politik adalah suatu proses yang dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan. Politik didefinisikan sebagai seni mengatur negara, hubungan antar negara, dan hak-hak warga negara dalam mengatur urusan kenegaraan. Ada juga yang mengaitkan politik sebagai aktifitas kelompok dalam masyarakat seperti partai politik (Takariawan, 2002: 47). Sesuai pengertian politik tersebut, partisipasi politik adalah hak setiap warga negara, baik perempuan atau laki-laki dalam mengatur urusan kenegaraan. Partisipasi politik sangat menjunjung kebebasan setiap warga negara sehingga tidak membedakan gender.

Witch dalam Indradjaja (1989: 93) mengatakan bahwa tertariknya seseorang untuk melakukan interaksi partisipasi ditentukan oleh prinsip atau asas saling melengkapi (*the principle of complementary*). Artinya, seseorang tertarik untuk mengadakan interaksi atau partisipasi bukan karena adanya kesamaan sikap, tetapi justru karena adanya perbedaan-perbedaan yang tercipta. Adanya perbedaan, misalnya dalam merasakan kekurangan diri sendiri dibandingkan dengan orang lain, justru akan mendorong seorang individu untuk mendapatkan yang kurang sesuai harapannya dari orang lain. Perbedaan tujuan, pandangan, dan ketidaksesuaian antara

harapan dan kenyataan akan kepastian hukum menjadi salah satu faktor pendukungnya.

Partisipasi politik anggota legislatif perempuan di Kota Semarang hasil pemilu tahun 2009 dalam pengambilan kebijakan sesuai dengan pengertian partisipasi politik yang dikemukakan oleh Khamisi dalam (Ruslan, 2000; 46) bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu untuk mempunyai peran dalam kehidupan politik melalui keterlibatan administratif untuk menggunakan hak bersuara, melibatkan dirinya diberbagai persoalan politik dengan pihak lain, ikut serta melakukan berbagai aksi dan gerakan, bergabung dengan partai-partai atau organisasi independen, ikut serta dalam kampanye penyadaran, memberikan penyadaran, memberikan pelayanan terhadap lingkungan dengan kemampuannya sendiri.

Sesuai piramida partisipasi politik menurut Roth dan Wilson, jumlah partisipasi politik perempuan di kota Semarang menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan di kota Semarang mayoritas hanya sebagai pengamat. Selanjutnya perempuan di Kota Semarang adalah hanya sebagai partisipan dan jumlahnya lebih sedikit dari perempuan yang pengamat. Jumlah partisipasi politik perempuan yang bisa menjadi aktivis jumlahnya sangat minimal. Hasilnya jumlah anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 hanya enam orang. Artinya jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang kurang dari 30% dari jumlah seluruh anggota legislatif di kota Semarang.

Partisipasi politik perempuan Kota Semarang khususnya legislatif adalah implementasi dari adanya wacana pengarusutamaan gender (PUG). Wacana tentang sebuah bentuk perlawanan yang diperlukan untuk menggugah kesadaran para pejabat pembuat kebijakan akan perlunya "*gender quality*" atau kesetaraan gender dari hasil pembangunan. Ketika kebijakan yang disusun sudah berwawasan gender, maka tetap perlu dievaluasi guna mengetahui efektifitas kebijakan-kebijakan dan program pembangunan tersebut sehingga memberikan keuntungan bagi perempuan. Selain adanya partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan diharapkan kesetaraan gender dapat benar-benar dirasakan kaum perempuan.

Faktor-faktor pendorong partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan di DPRD Kota Semarang tersebut sesuai dengan pendapat Surbakti (1992: 144) bahwa tinggi rendahnya partisipasi warga dalam proses politik suatu negara setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah kesada-

ran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kesadaran yang menyangkut pengetahuan warga tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan kesadaran menyangkut minat dan perhatian warga terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Adapun yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian warga terhadap pemerintah, apakah warga negara tersebut menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak.

Anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 berpartisipasi dalam politik karena adanya kesadaran akan apa yang terjadi dilingkungannya, berdasar pengalaman dan minatnya terhadap kesejahteraan perempuan di kota Semarang. Adanya kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah mendorong anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 untuk berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di DPRD kota Semarang.

Usulan atau kebijakan yang diajukan anggota legislatif perempuan jika ingin menjadi ketetapan maka suara harus memenuhi kuorum. Bila di DPRD kota Semarang baru enam anggota, berarti belum mampu memenuhi kuota 30 % dari jumlah seluruh anggota legislatif di DPRD kota Semarang yang berjumlah 50 (belum memenuhi kuorum). Peningkatan kuota anggota legislatif perempuan di kota Semarang harus diusahakan tercapai dalam pemilu legislatif periode yang akan datang. (Sutjipto, 2005: 167).

Terbukanya kesempatan perempuan untuk masuk dalam politik adalah peluang emas bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama dengan para lelaki. Berdasarkan gambaran di atas, maka tulisan ini dimaksudkan untuk mengungkapkan partisipasi politik perempuan sebagai anggota legislatif dalam pengambilan kebijakan yang berpihak pada kaum perempuan.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan pertimbangan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomenaBerbagai aktifitas yang dilakukan seseorang berkaitan dengan hak, tugas, wewenang, kesadaran, pilihan, tanggungjawab didasarkan pada

konsep-konsep yang diakui kebenarannya. Penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan atau menemukan simpulan yang rasional, objektif, dan memenuhi standar etik. Berbagai aktifitas anggota legislatif perempuan tidak selamanya sesuai dengan hak-hak, wewenang, dan tanggung jawabnya karena perempuan cenderung emosional.

Untuk mengkaji persoalan-persoalan di atas, maka fokus penelitian ini adalah seluruh aktifitas anggota legislatif perempuan dalam mengambil berbagai keputusan politik yang berkaitan dengan perjuangan dan pengakuan hak-hak perempuan pada DPRD Kota Semarang. Fokus penelitian ini mencakup berbagai aspek kajian, yaitu bentuk-bentuk partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anggota legislatif perempuan pada DPRD Kota Semarang dalam mengambil keputusan-keputusan politik.

Persoalan di atas dikaji berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian (informan, proses, perilaku, dan aktifitas) yang berkaitan dengan partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa anggota legislatif, baik perempuan maupun laki-laki yang dipandang memahami partisipasi politik anggota legislatif perempuan. Observasi dilakukan dengan pengamatan terhadap semua aktifitas dan perilaku anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan politik pada DPRD Kota Semarang. Sedangkan studi dokumen dilaksanakan dengan mengkaji beberapa dokumen yang berkaitan dengan peran serta anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan politik pada DPRD Kota Semarang.

Untuk menguji objektifitas data dilakukan dengan teknik triangulasi. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah triangulasi metode. Teknik ini dilaksanakan dengan cara mengecek balik antara data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun studi dokumen. Dengan demikian, objektifitas data penelitian dapat ditetapkan. Dalam teknik analisis ini terdapat 3 (tiga) komponen utama, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Hasil dan Pembahasan

Jumlah perempuan di Kota Semarang yang memasuki wilayah publik terus meningkat, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Bahkan, di bidang eksekutif, 2 (dua) kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada Pemilu tahun 2010 adalah perempuan, yaitu Harini dan Dasih. Di bidang legislatif ada 6 (enam) anggota legislatif perempuan hasil Pemilu tahun 2009 yang duduk sebagai anggota DPRD Kota Semarang. Sebuah tantangan sekaligus peluang bagi peningkatan pemberdayaan perempuan dalam wilayah publik (bidang politik) khususnya DPRD Kota Semarang.

Peningkatan jumlah perempuan dalam wilayah publik, terutama sebagai anggota DPRD seharusnya meningkatkan keputusan-keputusan politik yang berpihak kepada perempuan. Artinya, kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan semakin efektif. Namun dalam kenyataannya, persoalan-persoalan yang dihadapi perempuan belum dapat diselesaikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendek kata, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak perempuan belum dapat diselesaikan berdasarkan prinsip kesetaraan gender. Kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan buruh wanita, hak cuti melahirkan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan berbagai perilaku diskriminatif terhadap perempuan masih sangat dominan dalam mewarnai kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengakuan terhadap hak-hak politik perempuan makin luas dan meningkat. Namun, pengakuan terhadap hak-hak politik perempuan belum dapat menjamin sistem pemerintahan/sistem politik yang demokratis, di mana asas *representasi* dan *akuntabilitas* partisipasi politik perempuan diberi makna yang sesungguhnya. Artinya, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif tidak serta merta dapat mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang memiliki sensitivitas gender dapat diwujudkan secara nyata. Perempuan sebagai warga negara seharusnya dapat berpartisipasi secara mandiri dalam proses politik yang demokratis karena politik merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan gender.

Setiap warga negara berhak untuk ikut dalam proses politik khususnya penyelenggaraan pemerintahan. UUD 1945 menetapkan setiap warga negara berhak dan ikut berpar-

tisipasi dalam politik, baik laki-laki maupun perempuan. Politik bukanlah otonomi laki-laki ataupun perempuan saja. Partisipasi politik adalah realisasi hak masing-masing individu warga negara untuk menunjang pembangunan. Walaupun partisipasi politik tersebut mempunyai latar belakang masing-masing. Sehingga partisipasi politik anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 di kota Semarang dalam pengambilan kebijakan adalah sebuah keniscayaan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Utti Indrawati, S.IP bahwa "saya ikut pemilu dan bergabung dengan partai politik kemudian ikut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan di kota Semarang karena saya ingin menggunakan hak saya sebagai warga negara agar bisa membuat dan memperjuangkan nasib warga Semarang khususnya perempuan".

Alasan yang sama pun diungkapkan oleh Ibu Anna Endrawati bahwa "saya ingin berpartisipasi politik aktif dalam pengambilan kebijakan di kota Semarang dan mengoptimalkan hak dan potensi saya karena saya ingin mempengaruhi kebijakan pemerintah". Kedua ungkapan Utti Indrawati dan Anna Endrawati dibenarkan oleh keempat anggota legislatif perempuan lainnya, yaitu Arining Indharti Adhi, Hanik Khoiru Solikah, Sri Rahayu, dan Suciati

Kehadiran enam anggota legislatif perempuan kota Semarang hasil pemilu tahun 2009 dalam legislatif DPRD kota Semarang adalah sebagai bagian daripada partisipasi politik. Hal ini terkait fungsi DPRD kota Semarang sebagai sarana lembaga legislatif yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang terletak di daerah. Lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang legislasi. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyusun dan membuat kebijakan di tingkat kota Semarang. Lembaga legislatif daerah kota Semarang atau DPRD kota Semarang terletak di jalan Pemuda kota Semarang. Partisipasi politik anggota legislatif perempuan di kota Semarang hasil pemilu tahun 2009 adalah salah satu wujud adanya hasrat perempuan di kota Semarang untuk berpartisipasi dalam politik. Enam anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 terus berusaha untuk mempengaruhi dan melakukan partisipasi politik sesuai hak dan wewenangnya di DPRD kota Semarang.

Tugas DPRD Kota Semarang sebagai sebuah lembaga perwakilan rakyat di kota Semarang adalah menghasilkan kebijakan publik yang benar dan tepat sasaran, maka di DPRD diperlukan peran serta semua anggota dewan baik laki-laki ataupun perempuan. Sehingga anggota legislatif perempuan Kota Semarang

memanfaatkan tugas legislatif di DPRD melalui partisipasi politik yang maksimal. Seperti diungkapkan oleh Anna Endrawati, S.IP bahwa "hak legislatif kami selaku dewan kami lakukan melalui usulan atau pendapat dalam rapat atau sidang". Partisipasi politik anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 di kota Semarang dalam pengambilan kebijakan sebagaimana yang diungkapkan oleh Anna Endrawati, S.IP adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Bentuk partisipasi politik anggota legislatif perempuan kota Semarang hasil pemilu tahun 2009 dalam pengambilan kebijakan baru terbatas usulan dan pendapat disebabkan minimnya jumlah anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009. Jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD kota Semarang kurang memenuhi kuota 30% dari jumlah seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang. Namun, enam anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 tersebut tetap harus berpartisipasi secara optimal. Sehingga diharapkan kebijakan daerah yang dihasilkan berperspektif perempuan. Walaupun dari enam anggota legislatif perempuan tersebut berasal dari partai berbeda, yaitu: empat orang anggota legislatif perempuan berasal dari partai Demokrat. Keempat anggota legislatif perempuan tersebut adalah: Utti Indrawati, S.IP; Dra. Sri Rahayu; Anna Endrawati, S.IP, M.Si; Suciati. Selain itu, satu orang dari partai PDIP, yaitu Hanik Khoiru Sholikah, A.Md dan satu orang dari partai Hanura, yaitu Arining Indarti Adhi.

Peraturan tata tertib anggota Dewan tahun 2009-2014 memberikan kesempatan pada anggota legislatif perempuan dan laki-laki di DPRD Kota Semarang untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Kesempatan tersebut digunakan oleh anggota legislatif perempuan di DPRD kota Semarang hasil pemilu tahun 2009 untuk ikut serta dalam pengambilan kebijakan yang berprespektif perempuan di DPRD kota Semarang.

Berbagai peluang partisipasi politik perempuan sebagai anggota legislatif pada DPRD Kota Semarang telah dimanfaatkan, terutama dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perjuangan hak-hak perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, para anggota legislatif perempuan telah berusaha untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengarusutamaan gender (PUG) sehingga berbagai perilaku diskriminatif terhadap perempuan dapat dihilangkan. Anggota legislatif perempuan hasil pemilu ta-

hun 2009 di DPRD Kota Semarang menyalurkan apresiasinya dengan melalui usulan pendapat, atau turut serta dalam pengambilan keputusan.

Faktor-faktor pendorong anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 di DPRD kota Semarang dalam pengambilan kebijakan adalah sebagai berikut:

Keenam anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Semarang ingin mengusulkan adanya kebijakan yang berperspektif perempuan.

Anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 di Kota Semarang bermaksud meningkatkan kesejahteraan perempuan di Kota Semarang.

Anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 ingin meningkatkan bentuk partisipasi politik mereka dalam legislatif melalui pengambilan kebijakan di DPRD Kota Semarang.

Anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 ingin menunjukkan kepada anggota legislatif laki-laki di DPRD Kota Semarang bahwa perempuan bisa dan mampu membuat atau mengusulkan kebijakan untuk kepentingan perempuan.

Untuk menunjukkan eksistensi mereka di DPRD kota Semarang bahwa mereka mampu meningkatkan kesejahteraan perempuan di kota Semarang.

Faktor-faktor pendorong partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan di DPRD Kota Semarang tersebut sangat mempengaruhi partisipasi politik anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 dalam pengambilan kebijakan di kota Semarang. Motivasi keenam anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 muncul karena adanya kesadaran dan keinginan untuk mempengaruhi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak perempuan.

Setelah peneliti melakukan penelitian melalui wawancara, diskusi, angket dan dokumentasi diketahui beberapa faktor pendukung dan penghambat partisipasi politik anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan di kota Semarang. Faktor-faktor penghambat partisipasi politik anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 dalam pengambilan kebijakan di DPRD Kota Semarang adalah sebagai berikut; Sistem Politik dan Birokrasi, faktor psikologis, Faktor Kekurangpahaman Anggota Legislatif Laki-Laki tentang Wacana Pengarusutamaan Gender, kuota kurang dari 30%, sistem sosial budaya, kekurangpahaman Anggota Legislatif Perempuan Hasil Pemilu tahun 2009 tentang

Tugas Kedewanan dan Agenda Perempuan di DPRD.

Adapun faktor-faktor pendorong perempuan anggota legislatif di Kota Semarang hasil pemilu tahun 2009 dalam pengambilan kebijakan di DPRD Kota Semarang sebenarnya sudah mendukung program pengarusutamaan gender (PUG). Latar belakang anggota legislatif perempuan di Kota Semarang hasil pemilu tahun 2009 berpartisipasi politik khususnya dalam pengambilan kebijakan di Kota Semarang adalah sebagai berikut:

Adanya kesadaran anggota legislatif perempuan hasil pemilu tahun 2009 di Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Faktor pendidikan dan pengetahuan dalam politik anggota legislatif perempuan di Kota Semarang sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi anggota dewan. Sebagai contoh latar belakang pendidikan Anna Endrawati, S.I.P, M, Si adalah Ilmu Politik dan pernah menjadi dosen Ilmu Politik sebelum terpilih sebagai anggota legislatif perempuan.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan hasil pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

Semangat para anggota legislatif perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan sangat tinggi, meskipun belum dapat direalisasikan secara nyata. Artinya, partisipasi politik perempuan sebagai anggota legislatif belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kenyataan itu disebabkan oleh bentuk partisipasi politik perempuan masih sangat bergantung pada agenda rapat yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Semarang.

Bentuk partisipasi politik perempuan sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang diajukan pemerintah (eksekutif) sehingga hak inisiatif para anggota legislatif hampir tidak pernah dimanfaatkan. Lebih-lebih, bagi para anggota legislatif perempuan yang sangat terbatas jumlah dan kemampuannya.

Berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan, di antaranya wawasan dan pengalaman perempuan dalam bidang politik masih sangat terbatas, kepentingan partai politik jauh lebih dominan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat atau kelompok masyarakat, para anggota legislatif cenderung kurang mampu melaksanakan kepentingan para kontituennya, tata tertib DPRD Kota Semarang kurang membe-

rikan kebebasan kepada para anggotanya untuk menyampaikan pendapatnya.

Bertitik tolak dari simpulan di atas, maka melalui tulisan ini disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Kaum perempuan harus meningkatkan wawasan dan pengetahuannya di bidang politik dan pemerintahan agar mampu dan dapat melaksanakan partisipasi politik secara cerdas sesuai dengan kepentingan, hak, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam memajukan hidup dan kehidupan kaum perempuan.

Kaum perempuan sebagai anggota legislatif seharusnya memahami prinsip-prinsip pengarusutamaan gender (PUG) atau kesetaraan gender, sekaligus memiliki kesiapan dan kesediaan waktu dan tenaga untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan sesuai dengan nilai-nilai moral maupun bangsa yang bermartabat dan berkeadaban.

Kaum perempuan sebagai anggota legislatif harus meningkatkan kompetensinya agar mampu merubah budaya birokrasi yang kurang menghargai potensi dan kemampuan perempuan.

Memperkuat jaringan komunikasi antar anggota legislatif dengan organisasi perempuan non legislatif, sehingga ada koordinasi dan kesamaan agenda kerja perempuan dan diharapkan mampu menghasilkan kebijakan daerah yang berperspektif perempuan.

Meningkatkan peran partai politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi perempuan, agar mereka memperoleh pemahaman yang tepat tentang hak dan kewajiban politik setiap warga negara pada umumnya, kaum perempuan pada khususnya.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.
- Astuti, Tri Marhaeni P. 2007. *Kesenjangan Gender dalam Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan dalam Buku Ajar Antropologi Gender*. Fakultas Ilmu Sosial UNNES Semarang (tidak terbit).
- Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang. 2006. *Indikator Pemberdayaan Gender Kota Semarang Tahun 2006*. Semarang: Bappeda Kota Semarang dan Badan Pusat Statistik Kota Semarang.
- Cantor, Dorothy W. (dkk). 1998. *Woman in Power: Kiprah Perempuan dalam dunia Politik*. Jakarta: Pustaka Gramedia Utama.
- Harun, Rochayat dan Soemarmo. 2006. *Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar*. Bandung: Manjar Maju.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan. 2010. *Peran Organisasi Masyarakat Kaucus Perempuan politik Sebagai wadah konsolidasi dan Komunikasi Antar Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Sekretariat Kementrian Pemberdayaan Perempuan.
- KPU Kota Semarang. 2009. *Rekapitulasi Hasil Pemilu tahun 2009*. Semarang: KPU Kota Semarang.
- KPU Kota Semarang. 2009. *Sosialisasi hasil Pemilu tahun 2009*. Semarang: KPU Kota Semarang.
- Mangesti, Maria Tri. 2009. *Politik Perempuan dan Perempuan Politik*. Semarang: KPPI Kota Semarang.
- Pembayun, Ellys Lestari. 2009. *Perempuan Vs Perempuan: Realitas Gender, Tayangan Gosip, dan Dunia Maya*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Rahardjo, Yuliftita. 1992. *Pengantar Penelitian Berperspektif Perempuan*. Jakarta: PTI-LIPI.
- Soetjipto, Ani W. 1997. *Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik: dalam perempuan dan pemberdayaan*. Program Studi Kajian Wanita. Jakarta: Program pascasarjana UI. Hal 233-244.